



Implementasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong Kabupaten Barru

Syahril Adriansyah¹⁾, Djuanda Nawawi²⁾, Andi Muhammad Rusli³⁾

Universitas Hasanuddin, Tamalanrea, Makassar, Indonesia

adriansyahril16@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implemementasi kebijakan rencana detail tata ruang pengembangan kawasan strategis emas garongkong dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan rencana detail tata ruang kawasan strategis emas di Kabupaten Barru. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rencana detail tata ruang kawasan strategis emas garongkong Kabupaten Barru terkait Komunikasi Kebijakan, Sumber-sumber Kebijakan, Dispotition, dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan telah terfokus pada kegiatan pemerintah daerah dalam perencanaan hal itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2009 tentang penetapan Kawasan pelabuhan dan Kawasan strategis emas garongkong. Tetapi pada pengembangan Pembangunan menuju Kawasan Ekonomi Khusus belum sepenuhnya tercapai hal itu dapat terlihat dari tidak adanya Pembangunan serta kegiatan ekonomi yang cukup berarti pada Kawasan strategis emas. Sehingga potensi-potensi yang terdapat dalam Kawasan tidak akan tercapai seperti yang diharapkan.

Kata Kunci: Impelementasi, Kebijakan, Kawasan Strategis.

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of the detailed spatial planning policy for the development of the Garongkong gold strategic area and analyze the factors affecting the implementation of the detailed spatial planning policy for the gold strategic area in Barru Regency. The research was conducted in Barru Regency, South Sulawesi Province, using qualitative research methods and data collection techniques, including observation, interviews, and documentation. The results show that the implementation of the detailed spatial planning policy for the Garongkong gold strategic area in Barru Regency, regarding policy communication, policy resources, disposition, and bureaucratic structure in policy implementation, has been focused on local government activities in planning, in accordance with regional regulation number 5 of 2009 concerning the designation of the port area and the Garongkong gold strategic area. However, the development towards the Special Economic Zone has not been fully achieved, as evidenced by the absence of significant development and economic activities in the gold strategic area. Therefore, the potentials within the area will not be realized as expected.

Keywords: Implementation, Policy, Strategic Area.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara dengan berbagai potensi sumber daya alam yang tersebar diseluruh pelosok daerah di Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi modal utama dalam pembangunan perkonomian negara sehingga hal ini turut mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang berarti bahwa Pembangunan ekonomi suatu negara harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan.

Pengembangan kawasan ekonomi di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang baru. Pada tahun 1970, Indonesia berhasil mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Selanjutnya, pada tahun 1996 dikembangkan pula Kawasan Berikat (Bounded Warehouse), lalu dikembangkan Kawasan Industri (KI). Selanjutnya, tahun 2007 dikembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).

Tahun 2014, berdasarkan RPJMN 2015-2019, KEK diarahkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah. KEK sebagai kawasan strategis ditujukan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang memaksimalkan keuntungan aglomerasi dan terletak pada posisi strategis serta mendapat dukungan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029, disebutkan bahwa Kabupaten Barru merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus dengan ketersediaan lahan untuk KEK dengan harga tanah paling kompetitif. Kawasan Strategis Emas merupakan kawasan yang memperkuat usulan penetapan Kabupaten Barru sebagai KEK yang mencakup diantaranya Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung (yang kemudian disingkat Emas) berpusat di Garongkong yang terletak di wilayah Kecamatan Barru.

Hadirnya kawasan strategis yang telah dicanangkan sejak tahun 2009 dengan dibangunnya Pelabuhan Garongkong serta penetapan melalui Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong dengan tujuan menjaga konsistensi perkembangan kota dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah kabupaten dalam jangka panjang, menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah sekitarnya, menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Sehingga berpotensi menjadi daerah maju dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, pembangunan di kawasan tersebut juga diharapkan mampu memberikan dampak positif dan mendorong pembangunan baik didalam maupun diluar kawasan strategis emas.

Kabupaten Barru adalah salah satu daerah Pantai barat Sulawesi dengan luas wilayah 1.174,72 km dengan jumlah penduduk 172.767 jiwa. Dengan jarak 100 km dari kota Makassar, Sulawesi Selatan (BPS:2019). Pusat pemerintahan Kabupaten Barru terletak di Kecamatan Barru dengan luas wilayah 199,32 km dengan jumlah penduduk 41.078 jiwa. Kawasan Strategis Emas (Kelurahan Sepe'e, Kelurahan Mangempang, dan Desa Siawung) adalah lokasi dengan peruntukan wilayah yang termasuk dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Kabupaten Barru merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, adanya kolam pelabuhan terdalam 15 sampai dengan 25 meter memiliki potensi pengembangan pelabuhan dengan kapasitas tonase kapal paling besar, daerah teraman dari bencana tsunami; terletak dititik tengah dengan jarak 100 km dari kota Makassar dengan jarak tempuh selama 2 jam menuju Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta; berada jauh dari kawasan koservasi (karst Maros dan Pangkep); dan dukungan infrastruktur telah memenuhi persyaratan Kawasan Ekonomi Khusus.

Hasil observasi serta penelitian terdahulu, realita selama ini pengembangan kawasan strategis emas garongkong di Kabupaten Barru kurang maksimal dan tergolong lambat dalam pembangunan. Hal ini tentu saja disebabkan kurangnya pemahaman stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kawasan strategis. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Barru telah mempersiapkan lahan Seluas 4.000 hektar yang mana total luas kawasan belum mencapai 50% sesuai syarat pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Adanya hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, baik internal maupun eksternal, seperti lambatnya proses penyusunan kebijakan dan penetapan harga lahan yang tinggi oleh masyarakat kepada investor sedangkan pemerintah tidak dapat terlibat dalam proses negosiasi. Adanya permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan kawasan strategis emas garongkong di Kabupaten Barru. Untuk itu penulis mengambil judul Penelitian Implementasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilaksanakan pada kantor Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Pemerintah daerah Kabupaten Barru. Data akan dihimpun berdasarkan sumber dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. Semua sumber bukti ini akan ditetapkan dengan teknik purposive sampling yaitu sumber-sumber yang datanya dapat digunakan untuk menjelaskan fokus-fokus penelitian.

Observasi, pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Wawancara, melakukan wawancara langsung terhadap informan yang bersangkutan dalam penelitian. Penetapan informan kunci menggunakan Teknik purposive sampling yaitu menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian terkait program pengembangan Pembangunan dengan total 7 orang informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Kebijakan

Implementasi kebijakan akan lebih mudah apabila terjalin komunikasi yang baik antar organisasi yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Dalam konteks Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru, komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan tata ruang dapat diterapkan dengan baik. Komunikasi yang efektif memungkinkan adanya koordinasi yang lebih baik, penyampaian informasi yang jelas, serta penanganan konflik atau masalah yang mungkin muncul selama proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat perlu mengembangkan mekanisme komunikasi yang transparan dan responsif untuk memastikan keberhasilan kebijakan tata ruang.

Komunikasi di dalam dan antar organisasi merupakan suatu proses yang kompleks. Dalam proses penyampaian informasi dari atas ke bawah dalam suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lainnya, seringkali terjadi distorsi informasi. Misalnya, dalam implementasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong, distorsi informasi dapat terjadi jika tidak ada saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tata ruang tersebut. Selain itu, distorsi informasi juga dapat menghambat koordinasi antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan.

Hasil penelitian terkait Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong menunjukkan bahwa komunikasi yang baik antar organisasi dan dengan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan tata ruang. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan tata ruang dapat meningkatkan akseptabilitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, termasuk penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi publik, untuk memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam implementasi kebijakan tata ruang. Dengan demikian, komunikasi yang baik dapat menjadi landasan penting bagi keberhasilan implementasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru.

Ketetapan Pemahaman

Adanya komunikasi yang baik antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan akan mempermudah pemahaman terhadap kebijakan. Dalam upaya peningkatan pemahaman terhadap tujuan dari kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru, pemerintah daerah telah melakukan berbagai sosialisasi dan interaksi dengan bawahan serta antar organisasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pemahaman yang mendalam terhadap kebijakan ini. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah adanya perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman di antara para pegawai dan anggota organisasi, yang mengakibatkan perbedaan dalam tingkat pemahaman dan penerimaan kebijakan.

Kurangnya pemahaman individual terhadap kebijakan sering kali disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan personal yang berbeda-beda. Penelitian terkait Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan yang lebih khusus dan terfokus dapat membantu mengatasi hambatan ini. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu serta menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelatihan tersebut. Selain itu, pendekatan komunikasi yang lebih interaktif dan partisipatif, seperti diskusi kelompok dan lokakarya, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan individu dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, peningkatan kualitas komunikasi dan pelatihan dapat memperkuat pemahaman dan penerimaan kebijakan tata ruang, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan pelaksanaannya di Kawasan Strategis Emas Garongkong, Kabupaten Barru.

Mekanisme Komunikasi

Mekanisme serta prosedur yang memungkinkan pejabat daerah melakukan komunikasi secara efektif sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi penyelenggara dapat bertindak sesuai dengan harapan pihak perencanaan. Dalam konteks Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru, mekanisme komunikasi ini mencakup cara penyampaian kebijakan dari Bappeda Kabupaten Barru kepada bawahan dan instansi terkait lainnya. Komunikasi yang efektif memerlukan jalur yang jelas dan terbuka antara Bappeda sebagai perencana kebijakan dan instansi pelaksana, sehingga setiap pihak memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pembangunan dan pengawasan kawasan strategis tersebut.

Penelitian terkait Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong menunjukkan bahwa salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini adalah adanya koordinasi yang baik antara Bappeda dan instansi-instansi lainnya. Bappeda, sebagai badan perencanaan, harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun telah dipahami dengan baik oleh instansi pelaksana melalui sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan. Selain itu, mekanisme komunikasi formal, seperti rapat koordinasi dan laporan periodik, perlu diimbangi dengan komunikasi informal yang lebih fleksibel dan responsif. Dengan demikian, setiap instansi dapat segera menanggapi perubahan dan tantangan yang muncul dalam proses pembangunan dan pengawasan kawasan strategis ini.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, termasuk masukan dari instansi pelaksana dan stakeholder terkait. Dalam hal ini, penting bagi Bappeda untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang efektif tidak hanya membantu dalam penyampaian kebijakan, tetapi juga dalam mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul selama pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, upaya pengembangan Kawasan Strategis Emas Garongkong dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berkat adanya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan prosedur yang jelas antara semua pihak yang terlibat.

Sumber-Sumber Kebijakan

Rencana detail tata ruang dalam pengembangan Kawasan strategis emas garongkong kabupaten barru terdiri atas sumber daya manusia dan sumber dana sebagai sumber kebijakan yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam kebijakan rencana detail tata ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong sangat penting, terutama terkait tingkat pengetahuan dan kemampuan mereka dalam memahami tujuan pembentukan kebijakan ini. Setiap individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan memiliki peran yang jelas dan terdefinisi, mulai dari internal Bappeda sebagai penanggung jawab utama dalam pengembangan kawasan, hingga berbagai instansi lain yang memiliki peran dalam pelaksanaan kebijakan. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab memastikan aspek keberlanjutan lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum mengurus infrastruktur, Dinas Tata Ruang mengelola penggunaan lahan, Dinas Perhubungan memastikan aksesibilitas, dan Dinas Pariwisata mengembangkan potensi wisata kawasan. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dari setiap individu dalam instansi-instansi ini sangat penting agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar yang memiliki lahan di Kawasan Emas Garongkong, serta masyarakat Kabupaten Barru secara keseluruhan, sebagai penerima manfaat dari kebijakan ini juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat dari kebijakan ini, serta bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan kawasan. Edukasi dan sosialisasi yang terus-menerus harus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memastikan dukungan mereka terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat, akan menjadi kunci sukses dalam implementasi rencana detail tata ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong.

2. Sumber Dana

Sumber dana merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong. Kebutuhan dana mencakup berbagai tahap perencanaan dan pelaksanaan yang harus dikelola oleh pemerintah daerah, dengan sumber utama berasal dari APBD Kabupaten Barru. Sayangnya, anggaran ini sering kali belum mencukupi untuk

memenuhi seluruh kebutuhan proyek yang luas dan kompleks ini. Oleh karena itu, peran swasta menjadi sangat krusial dalam mendukung pembangunan kawasan ini. Investasi dari sektor swasta tidak hanya mencakup dana untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup biaya pembebasan lahan yang signifikan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah daerah dan investor swasta menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek dari kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.

Disposisi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan. Pemahaman yang mendalam, baik secara umum maupun rinci, mengenai ukuran-ukuran dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh kebijakan, sangat penting untuk pelaksanaan yang efektif. Tanpa pemahaman yang jelas, pelaksana kebijakan dapat menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Ketidaktaatan terhadap kebijakan ini, baik disengaja maupun tidak, dapat berakibat pada kegagalan implementasi dari kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong, yang pada gilirannya menghambat potensi manfaat yang bisa diperoleh dari kebijakan tersebut.

Arah tanggapan para pelaksana kebijakan, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Barru serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, menunjukkan dukungan dan penerimaan terhadap hadirnya kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong. Dukungan ini terlihat dari harapan tinggi terhadap pengembangan kawasan strategis tersebut. SKPD yang terlibat, seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik dan berkesinambungan.

Selain dukungan internal dari pemerintah daerah dan SKPD, masyarakat sekitar juga harus dilibatkan dalam proses implementasi kebijakan. Masyarakat yang memiliki kepemilikan lahan di kawasan Emas Garongkong maupun masyarakat Kabupaten Barru secara keseluruhan perlu diberikan pemahaman mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan ini. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan keberhasilan implementasi, karena mereka adalah penerima manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Selain itu, dengan melibatkan masyarakat, kemungkinan terjadinya konflik atau resistensi terhadap kebijakan dapat diminimalisir.

Untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini, perlu adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan SKPD dan investor swasta untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul. Dukungan finansial dari APBD dan investasi swasta harus dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan sikap yang positif, pemahaman yang mendalam, dan koordinasi yang efektif, kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong dapat diimplementasikan dengan sukses, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Kabupaten Barru.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peranan penting dalam menjelaskan karakteristik organisasi pelaksana yang bekerja untuk implementasi kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong. Pemerintah daerah melalui Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) telah memiliki struktur organisasi yang jelas dan terstruktur sebagai pelaksana kebijakan ini. Dalam struktur tersebut, peran Bappeda adalah sebagai penanggung jawab utama dalam perencanaan, pengawasan, dan koordinasi antar instansi yang terlibat. Dengan demikian, Bappeda memastikan bahwa setiap langkah dalam proses implementasi kebijakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong melibatkan beberapa instansi pemerintah dengan program-program yang berkaitan langsung dengan pengembangan kawasan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pariwisata semuanya memiliki peran spesifik dalam memastikan kebijakan ini berjalan lancar. Unsur perencanaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Bappeda menjadi kunci dalam menyelaraskan berbagai program yang dijalankan oleh instansi-instansi tersebut. Kerja sama yang baik antar instansi ini sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

Indikator keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi pelaksana. Salah satu indikator utama adalah kompetensi staf pelaksana kebijakan. Di Kabupaten Barru, beberapa staf dan satuan kerja perangkat daerah telah memenuhi kompetensi yang diperlukan untuk memahami dan menjalankan kebijakan ini. Kompetensi ini mencakup pemahaman yang baik terhadap

tujuan kebijakan, keterampilan teknis, dan kemampuan dalam koordinasi dan komunikasi. Dengan kompetensi yang memadai, staf pelaksana dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif, yang pada akhirnya akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memastikan semua staf pelaksana memiliki pemahaman yang sama dan kemampuan yang memadai. Pelatihan dan peningkatan kapasitas staf secara berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Selain itu, evaluasi rutin terhadap struktur birokrasi dan mekanisme kerja antar instansi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana. Dengan struktur birokrasi yang jelas, kompetensi staf yang memadai, dan koordinasi yang efektif antar instansi, kebijakan Kawasan Strategis Emas Garongkong diharapkan dapat diimplementasikan dengan sukses, memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barru.

Faktor Pendukung

1. Potensi wilayah Kabupaten Barru berada pada lokasi titik tangkap

Kabupaten Barru memiliki potensi wilayah yang strategis dengan lokasi titik tangkap yang signifikan, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Lokasi ini memungkinkan akses mudah ke sumber daya laut yang melimpah, sehingga mendukung kegiatan perikanan skala besar dan industri pengolahan hasil laut. Selain itu, keberadaan titik tangkap yang strategis ini juga membuka peluang bagi pengembangan pariwisata bahari, yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional. Potensi ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Barru sebagai pusat perikanan dan pariwisata di wilayah tersebut.

2. Sumber daya manusia yang memadai

Kabupaten Barru juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Masyarakat lokal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang mendalam tentang perikanan, kelautan, dan sektor-sektor terkait lainnya. Selain itu, adanya program pelatihan dan pendidikan yang terus-menerus diadakan oleh pemerintah daerah dan lembaga pendidikan setempat membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan tenaga kerja. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan pembangunan di kawasan strategis tersebut.

3. Komitmen pemerintah dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong

Pemerintah Kabupaten Barru menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan daerah melalui penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong. Kebijakan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam mengarahkan dan mengatur penggunaan lahan secara optimal untuk berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perikanan, pariwisata, dan industri. Komitmen ini tidak hanya mencerminkan visi jangka panjang pemerintah daerah untuk pengembangan yang berkelanjutan tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi para investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya rencana yang terperinci, pemerintah memastikan bahwa pengembangan kawasan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor Penghambat

1. Pembebasan Lahan

Pembebasan lahan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengembangan Kawasan Strategis Emas Garongkong di Kabupaten Barru. Proses ini melibatkan negosiasi antara pemerintah dan pemilik lahan untuk memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain yang mendukung kawasan tersebut. Tantangan yang sering dihadapi dalam pembebasan lahan termasuk perbedaan pandangan mengenai nilai lahan dan resistensi dari pemilik lahan yang mungkin khawatir kehilangan tanah mereka tanpa kompensasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang transparan dan adil serta komunikasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2. Kurangnya masyarakat yang mengetahui keberadaan kawasan

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan Kawasan Strategis Emas Garongkong adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat lokal mengenai keberadaan dan potensi kawasan tersebut. Banyak anggota masyarakat mungkin belum memahami sepenuhnya manfaat dan peluang yang



ditawarkan oleh kawasan strategis ini. Kekurangan informasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan atau apatisme terhadap inisiatif pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi yang komprehensif agar masyarakat dapat terlibat aktif dan mendukung pengembangan kawasan tersebut, baik sebagai penerima manfaat langsung maupun sebagai mitra dalam proses pembangunan.

3. Kurangnya investor yang bersedia menanamkan modalnya karena penetapan harga tinggi oleh masyarakat

Tingginya harga lahan yang ditetapkan oleh pemilik tanah lokal merupakan hambatan signifikan bagi investor yang berpotensi menanamkan modal mereka di Kawasan Strategis Emas Garongkong. Investor mencari kondisi investasi yang menguntungkan dan penetapan harga lahan yang terlalu tinggi dapat mengurangi daya tarik kawasan ini sebagai destinasi investasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kebijakan harga lahan yang realistis dan kompetitif serta insentif yang menarik bagi investor. Pemerintah daerah perlu memainkan peran aktif dalam mediasi antara pemilik lahan dan calon investor untuk mencapai harga yang wajar dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat mendorong arus investasi yang berkelanjutan ke kawasan tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi kebijakan rencana detail tata ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong Kabupaten Barru. Kesimpulan yang diambil berdasarkan tujuan dari hasil penelitian adalah Implementasi Kebijakan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Emas Garongkong dalam pengembangan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus sebagai berikut:

Penentu keberhasilan dalam hal ini, Komunikasi Kebijakan, Sumber-sumber Kebijakan, Disposition, dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan telah terfokus pada kegiatan perencanaan hal itu sesuai dengan peraturan daerah nomor 5 tahun 2009 tentang penetapan Kawasan pelabuhan dan Kawasan strategis emas garongkong. Tetapi pada pengembangan Pembangunan menuju Kawasan Ekonomi Khusus belum sepenuhnya tercapai hal itu dapat terlihat dari tidak adanya Pembangunan serta kegiatan ekonomi yang cukup berarti pada Kawasan strategis emas. Sehingga potensi-potensi yang terdapat dalam Kawasan tidak akan tercapai seperti yang diharapkan.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian dan Kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka Peneliti memberikan saran-saran yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah dalam Hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Barru untuk berkomitmen lebih terhadap peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan emas garongkong dengan menempatkan sebagai prioritas unggulan sekalipun terjadi pergantian pemimpin daerah tetap harus menjadikan sebagai prioritas.
2. Selanjutnya pemerintah daerah juga diharapkan mampu membangun atau mendirikan Badan Usaha pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus sebagai salah satu syarat persetujuan mengingat dalam kawasan garongkong terdapat Perseroda tetapi berfokus pada pengembangan Pelabuhan.
3. Kemudian perlu adanya Manajemen sumber daya manusia dalam hal penempatan personalia pada setiap instansi terkait menjadi juga sangat penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga bisa bekerja dengan optimal serta responsif dalam membangun hubungan kerja sama, kemitraan untuk dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus garongkong sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2015 tentang rencana detail tata ruang kawasan emas garongkong kabupaten barru, serta bagi masyarakat dengan kepemilikan dalam kawasan dapat berpartisipasi dengan menetapkan harga sewajarnya mengingat investor memperhitungkan segala keuntungan pada tiap investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta: Graha Ilmu

Adi Tarwiyah. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Akbar. 2015. Implementasi Kebijakan Kawasan Strategis Emas di Kabupaten Barru, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.



Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru 2019

- Hamdi, Muchlis. 2013. Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Gahalia Indonesia
- Hidayat, S., & Hidayat, A. S. (2010). Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Jakarta : Rajawali Pers.
- Indahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Rian. 2008. Public Policy. Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Rian. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Subarsono, 2011. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Winarmo, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarmo, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jakarta: CAPS